

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia tercetus pada tahun 1999 yang lahir ditengah gejolak sosial yang didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia disekitar tahun 1997. Gejolak sosial ini kemudian berujung pada krisis politik yang puncaknya ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah jatuhnya rezim orde baru, lahirlah permasalahan baru terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan dari daerah-daerah yang selama ini merasa telah memberikan kontribusi besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya tetapi tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Wacana otonomi daerah kemudian muncul sebagai suatu konsep alternatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan sistem pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang diharap mampu membangun negara secara lebih efektif dan efisien.

Widajaja (2002) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dihimbau untuk tidak terlalu aktif mengatur daerah sehingga daerah lebih mandiri dalam menentukan segala kebijakan-kebijakan yang daerah yang akan laksanakan. Pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah diharapkan mendapatkan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yang dapat memajukan daerah dengan mengenali kemampuan, kekuatan, kapasitas sumber-sumber daya alamnya yang akan pemerintah daerah kelola secara maksimal. Dengan adanya otonomi daerah juga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk memperkuat kinerja, dan dapat mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada publik atau masyarakat.

Sejak otonomi daerah dan desentralisasi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, pemekaran daerah kabupaten dan kota dan juga provinsi menjadi suatu fenomena, sejak saat itu jumlah daerah terus bertambah. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini memiliki 34 provinsi dan 514 kota dan kabupaten yang tersebar dari sabang sampai merauke.

Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan pemekaran wilayah. Hal tersebut dapat dipicu oleh faktor perbedaan agama, perbedaan etnis (budaya), ketimpangan (disparitas) pembangunan ekonomi antar wilayah dan luas wilayah. Secara formal, keinginan pemekaran wilayah dipicu dalam kerangka meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi tidak dapat pula dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Alqur'an Surah Al'Araf ayat 96 dijelaskan bahwa sekiranya jika tidak bertakwa dan tidak beriman kepada Allah SWT maka bukan hanya akan mendapatkan kemurkaan Allah SWT, namun Allah SWT akan mengangkat berkah yang Allah SWT berikan. Lebih lanjutnya lagi adalah ketika mendustakan dan menginjak-injak apa yang telah dibawa dan diajarkan oleh para Nabi dan Rasul maka Allah akan membalas dan memberikan azab yang pedih.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-A'raf, ayat 96).

Terdapat perbedaan di antara para musafir mengenai penjelasan tentang berkah langit dan bumi, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud berkah adalah turunnya hujan dan tumbuhnya tetumbuhan. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah berkah maknawi dan materi. Sebagian mengatakan yang dimaksud adalah ijabahnya doa dan penyelesaian dari masalah-masalah. Namun yang harus diingat adalah ketika Allah SWT mencabut berkah langit dan bumi maka sudah pasti mempengaruhi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah wilayah.

Salah satu wilayah yang berada di Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah provinsi dengan urutan ketiga pemegang daerah pemekaran terbanyak sejak tahun 2001 dengan 14 daerah pemekaran, setelah urutan pertama

dipegang oleh Provinsi Papua dengan 19 daerah pemekaran, dan urutan kedua dengan jumlah yang sama oleh provinsi Sumatera Utara sebanyak 14 daerah pemekaran. Dengan 14 daerah pemekaran, Sultra dalam hal ini, diharapkan menjadi salah satu daerah yang mandiri dengan potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai komoditi unggulan diantaranya dibidang pertanian meliputi kakao, kacang mede, kelapa, cengkeh, kopi, pinang, merica dan vanili, dan dibidang pertambangan meliputi aspal, nikel, emas, marmer, dan sebagainya. Tak lupa juga potensi sejarah, kebudayaan, dan alam yang dimiliki, salah satunya adalah Taman Nasional Wakatobi yang memiliki 750 spesies terumbu karang dari 850 spesies terumbu karang dunia.

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 UU No.13 Tahun 1964. Pada awalnya Sultra terdiri atas 4 kabupaten, yaitu : Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, dengan bau-bau sebagai ibukota provinsi. Lalu ibukota provinsi berganti menjadi di Kabupaten Kendari.

Pada tahun 1995 dibentuk satu kota yaitu Kota kendari, dan terbentuk daerah pemekaran yaitu Kabupaten Konawe hasil pemekaran dari Kabupaten Kendari. Pada masa awal reformasi terbentuk satu kota baru lagi yaitu Kota Baubau, pemekaran dari Kabupaten Buton.

Seiring era otonomi daerah dan desentralisasi berlangsung, di Sulawesi Tenggara terbentuk daerah otonom baru. Saat ini, Sultra memiliki 2 kota dan 15 Kabupaten, sebagai berikut :

TABEL 1.1
Daerah Otonom Baru dan Waktu Pemekaran

No.	Nama Daerah	Hasil Pemekaran dari	Tanggal Pemekaran
1	Kabupaten Buton		1964
2	Kabupaten Muna		1964
3	Kabupaten Kolaka		1964
4	Kabupaten Kendari		1964
5	Kabupaten Konawe	Kabupaten Kendari	1995
6	Kota Kendari	Kabupaten Kendari	1995
7	Kota Baubau	Kabupaten Buton	2001
8	Kabupaten Bombana	Kabupaten Buton	18 Desember 2003
9	Kabupaten Wakatobi	Kabupaten Buton	18 Desember 2003
10	Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten Kolaka	18 Desember 2003
11	Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Konawe	25 Februari 2003
12	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten Konawe	2 Januari 2007
13	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Muna	2 Januari 2007
14	Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten Kolaka	14 Desember 2012
15	Kab. Konawe Kepulauan	Kabupaten Konawe	12 April 2013
16	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten Buton	Juli 2014
17	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten Buton	Juli 2014
18	Kabupaten Muna Barat	Kabupaten Muna	Juli 2014

Sumber : BPS 2018

Konawe Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah 5.101,76

km² (Daratan) dengan jumlah penduduk 62.403 jiwa. Komoditi unggulan Kabupaten Konawe Utara yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Merica, dan Pala.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2015) yang menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh mendapatkan hasil bahwa semua daerah induk memiliki angka kinerja ekonomi daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pemekarannya. Artinya bahwa kinerja ekonomi daerah induk masih lebih baik dibandingkan daerah pemekaran. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sardi (2016) menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2009-2013 Kabupaten Konawe Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik namun kemampuan fiskal yang rendah.

Salah satu tujuan dari pemekaran itu sendiri yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Keadaan yang terjadi pada Perekonomian dan keadaan Pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kab. Konawe Utara, Tahun 2011-2015

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2011	9,04
2012	8,58
2013	7,01
2014	3,15
2015	6,75

Sumber : BPS 2018

Perekonomian Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015 mengalami peningkatan setelah mengalami perlambatan pada tahun 2011-2014, yaitu dari 9,04% di tahun 2011 turun menjadi 8,58% di tahun 2012, kemudian turun kembali menjadi 7,01% pada tahun 2013, dan terus turun menjadi 3,15% di tahun 2014 dan akhirnya meningkat kembali menjadi 6,75% di tahun 2015.

TABEL 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kab. Konawe Utara, Tahun 2011-2015

Tahun	PDRB (Dalam Juta Rupiah)
2011	1.756.433,05
2012	1.907.058,06
2013	2.040.835,62
2014	2.105.152,61
2015	2.247.306,50

Sumber : BPS 2018

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa PDRB Kab. Konawe Utara mengalami kenaikan ditiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB Kab. Konawe Utara sebesar 1.756.433,05 dan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 2.247.306,50.

TABEL 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Konawe Utara Tahun 2011-2015

Tahun	IPM
2011	69,24
2012	64,87
2013	65,54
2014	66,03
2015	66,44

Sumber : BPS 2018

Dari data diatas, diketahui bahwa IPM Kab. Konawe Utara mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan IPM dari 69,24 menjadi 64.87. Sedangkan ditahun berikutnya mengalami kenaikan menjadi 65,54 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan IPM dari tahun sebelumnya menjadi 66,03 dan pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 66,44.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara?
2. Bagaimana Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Konawe Utara?
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara?
4. Bagaimana Kinerja Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak pemekaran daerah di Kab. Konawe Utara, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.
2. Mengetahui bagaimana Analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Konawe Utara.
3. Mengetahui bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Konawe Utara.
4. Mengetahui bagaimana Kinerja Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Bahan informasi tentang bagaimana pemekaran di Indonesia;
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perumus kebijakan pembangunan dalam usaha pembangunan di daerah pemekaran Kota/Kabupaten di Prov. Sulawesi Tenggara khususnya daerah Kab. Konawe Utara;
3. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang membahas pemekaran wilayah.